



INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

itprov
SULAWESI BARAT

**SULBAR
MAJU**

RENCANA KERJA

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

**TAHUN
2025**



INSPEKTORAT_SULBAR



INSPEKTORAT SULBAR



INSPEKT PROVSULBAR



ITPROV_SULBAR



INSPEKTORAT.SULBARPROV.GO.ID

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke Hadirat Tuhan Yang maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025.

Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Rencana kerja ini merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen perencanaan Perangkat Daerah dan dokumen perencanaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Kami telah mengoptimalkan seluruh kemampuan untuk menyajikan rencana kerja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2025 dengan baik, namun karena keterbatasan banyak hal, maka kami menyadari bahwa rencana kerja ini masih banyak kekurangan.

Oleh karena itu masukan dan saran perbaikan dari semua pihak akan diterima dengan senang hati untuk perbaikan penyusunan di masa yang akan datang. Semoga rencana kerja ini bermanfaat dan menjadi bagian dari keinginan bersama untuk perbaikan berkelanjutan bagi Inspektorat Daerah dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Mamuju, Mei 2024

Kepala Inspektorat Daerah



Drs. H.M. Natsir MM

NIP: 19661231 198603 1 116

Pangkat: Pembina Utama Madya

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	3
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	
2.1 Evaluasi Sasaran Perangkat Daerah Rencana Kerja Tahun 2024	5
2.2 Realisasi Anggaran	9
2.3 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah	10
2.4 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah	11
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	12
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	14
BAB V PENUTUP	
Penutup	33

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) Tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Penyusunannya berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sebagaimana amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Wajib menyusun Renja sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) Tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional .

Selain itu, penyusunan Renja Kerja (Renja) perangkat daerah juga ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam Pasal 15 Ayat (1) yang mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026. Oleh karena itu, penyusunan Renja ini dikerjakan secara simultan dan paralel dengan penyusunan RKPD Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
4. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat;
5. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005–2025;
6. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050–5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2005 – 2025;
20. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 ;
21. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 24 Tahun 2022 tentang Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 disusun untuk mewujudkan target kinerja Tahun 2025 dengan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki. Adapun tujuan penyusunan Renja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut :

1. Menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) ke dalam rencana operasional tahunan
2. Menjadi pedoman bagi aparatur internal dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025 serta
3. Menjadi alat ukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan tugas Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat

1.4 Sistematika Penulisan

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dokumen

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada BAB ini dijabarkan penjelasan ringkas tentang Rencaja Kerja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja dan dengan RKPO dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, serta Proses Penyusunan Renja

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Bab ini berisi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 sebgaimana tabel evaluasi terhadap hasil rencana kerja perangkat daerah.

Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II tahun berjalan sebagaimana tabel Evaluasi terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah

BAB III: TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini dijabarkan penelahaan arah keijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, serta program dan kegiatan.

BAB IV: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat program kerja dan kegiatan, output kegiatan, target kinerja, pagu indikatif serta rencana pendanaan tahun berikutnya Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua Rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi uraian penutup yang terdiri atas capaian penting yang perlu mendapat perhatian, kaidahkaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Sasaran Perangkat Daerah Rencana Kerja Tahun 2024

EVALUASI RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Rencana	Realisasi Capaian Kinerja Rencana sampai dengan Rencana Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan Rencana Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana s/d tahun 2024 (%)			
							I		II		III		IV											
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K	Rp
3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		
Semua Bidang																								
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			45.920.818.486			13.679.617.688		3.733.370.927		2.824.387.029		2.220.047.329		4.806.632.813		13.584.438.098		99,30%		13.584.438.098		29,58%		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya Nilai Perencanaan Kinerja Laporan OPD (Poin)		441.185.062	0,00	-	163.126.501		27.700.000		34.550.000		31.275.000		69.595.200		163.120.200		100,00%	0,00	163.120.200		0,37		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4,00	74.185.062	0,00	-	50.355.084	1	5.200.000	1	14.700.000	1	12.775.000	-	17.680.000	3	50.355.000	100,00%	100,00%	3,00	50.355.000	75,00	67,88%		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2,00	74.000.000	0,00	-	20.000.000	1	3.750.000	-	4.500.000	-	2.850.000	-	8.896.500	1	19.998.500	100,00%	99,99%	1,00	19.998.500	50,00	27,03%		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2,00	56.000.000	0,00	-	19.165.000	-	3.750.000	-	2.850.000	1	2.500.000	-	10.064.200	1	19.164.200	100,00%	100,00%	1,00	19.164.200	50,00	34,22%		
Koordinasi dan Penyusunan DFA-SKPD	Jumlah Dokumen DFA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DFA-SKPD (Dokumen)	2,00	56.000.000	0,00	-	20.109.680	1	3.750.000	-	4.600.000	-	2.500.000	-	9.259.400	1	20.109.400	100,00%	100,00%	1,00	20.109.400	50,00	35,91%		
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DFA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DFA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DFA-SKPD (Dokumen)	2,00	55.000.000	0,00	-	18.052.481	-	3.750.000	-	2.500.000	1	3.650.000	-	8.150.600	1	18.050.600	100,00%	99,99%	1,00	18.050.600	50,00	32,62%		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2,00	63.000.000	0,00	-	16.569.856	3	3.750.000	-	2.500.000	-	3.400.000	-	6.909.000	3	16.569.000	100,00%	99,99%	3,00	16.569.000	150,00	26,28%		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7,00	63.000.000	0,00	-	18.884.400	1	3.750.000	1	2.900.000	1	3.600.000	1	8.633.500	4	18.883.500	100,00%	100,00%	4,00	18.883.500	57,14	29,97%		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya Konsistensi Penganggaran Anggaran terhadap Perencanaan Laporan OPD (Poin)	0,00	40.281.061.023	0,00	-	100	11.530.407.968	25	3.531.641.352	25	2.434.083.677	-	1.718.869.083	-	3.754.075.871	50	11.438.669.983	50,00%	99,20%	50,00	11.438.669.983	0,00%	189,69%	
Penyediaan Gaj dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaj dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	304,00	40.132.010.065	0,00	-	77	11.478.863.504	77	3.520.391.352	77	2.426.083.677	77	1.711.369.083	77	3.729.282.571	77	11.387.126.683	100,00%	99,20%	77,00	11.387.126.683	25,33	28,37%	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	100,00	125.000.000	0,00	-	4	15.794.464	1	3.750.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	7.044.300	4	15.794.300	100,00%	100,00%	4,00	15.794.300	4,00	12,64%	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	48,00	24.050.958	0,00	-	1	35.750.000	1	7.500.000	-	5.500.000	-	5.000.000	-	17.749.000	1	35.749.000	100,00%	100,00%	1,00	35.749.000	2,08	148,64%	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tercapainya Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup OPD (Poin)	0,00	8.000.000	0,00	-	100	-	25	-	25	-	-	-	-	50	-	50,00%	0,00%	50,00	-	0,00%	0,00%		
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	4,00	8.000.000	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00	0,00%		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tercapainya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD (Poin)	0,00	2.120.000.000	0,00	-	100	118.819.120	25	4.300.000	25	5.550.000	-	72.831.000	-	35.698.600	50	118.379.600	50,00%	99,63%	50,00	118.379.600	0,00%	57,33%	
Pengadaan Pakan Dinas Beserta Abjad Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakakan Dinas Beserta Abjad Kelengkapan (Paket)	4,00	480.000.000	0,00	-	1	66.484.600	-	-	1	-	-	-	65.135.000	-	939.600	1	66.074.600	100,00%	99,38%	1,00	66.074.600	25,00	13,77%

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra sd Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra sd tahun 2024 (%)	
								I		II		III		IV									
3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	60,00	1.400.000.000	0,00	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00	0,00%
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0,00	120.000.000	0,00	-	50	52.334.520	-	4.300.000	-	5.550.000	50	7.696.000	-	34.759.000	50	52.305.000	100,00%	99,94%	50,00	52.305.000	#DIV/0!	43,59%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0,00	120.000.000	0,00	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	#DIV/0!	0,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya Pengelolaan Administrasi Umum meliputi QPD (Persen)	0,00	140.572.395	0,00	-	100	657.049.361	25	72.637.220	25	93.156.900	-	108.354.620	-	382.277.241	50	656.425.981	50,00%	99,91%	50,00	656.425.981	0,00%	10318,86%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4,00	32.000.000	0,00	-	1	5.678.746	-	-	-	1.742.000	1	2.384.400	-	1.474.600	1	5.581.000	100,00%	98,28%	1,00	5.581.000	25,00	17,44%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4,00	13.000.000	0,00	-	2	72.682.256	-	11.381.000	1	11.410.000	1	15.193.000	-	34.687.700	2	72.681.700	100,00%	100,00%	2,00	72.681.700	50,00	559,09%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4,00	5.000.000	0,00	-	4	60.183.228	1	11.348.650	1	7.140.000	1	21.500.000	1	20.193.000	4	60.181.650	100,00%	100,00%	4,00	60.181.650	100,00	1203,63%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	4,00	5.000.000	0,00	-	12	23.640.000	3	-	3	660.000	3	660.000	3	22.320.000	12	23.640.000	100,00%	100,00%	12,00	23.640.000	300,00	472,80%
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	4,00	2.000.000	0,00	-	1	124.532.331	1	25.085.000	1	23.569.800	1	30.780.000	1	45.097.000	1	124.531.800	100,00%	100,00%	1,00	124.531.800	25,00	6225,59%
Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	4,00	2.000.000	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00	0,00%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4,00	79.572.395	0,00	-	40	342.132.800	10	24.822.570	10	48.635.100	10	37.857.220	10	230.294.941	40	341.609.831	100,00%	99,85%	40,00	341.609.831	1000,00	429,31%
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	4,00	2.000.000	0,00	-	1	28.200.000	-	-	-	-	-	-	1	28.200.000	1	28.200.000	100,00%	100,00%	1,00	28.200.000	25,00	1410,00%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Pengelolaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	0,00	1.550.000.000	0,00	-	100	103.989.989	25	-	25	84.700.000	-	-	-	18.279.100	50	102.979.100	50,00%	99,03%	50,00	102.979.100	0,00%	51,49%
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	4,00	1.050.000.000	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00	0,00%
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	4,00	100.000.000	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00	0,00%
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	4,00	200.000.000	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00	0,00%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	60,00	200.000.000	0,00	-	11	103.989.989	3	-	2	84.700.000	3	-	3	18.279.100	11	102.979.100	100,00%	99,03%	11,00	102.979.100	18,33	51,49%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	0,00	740.000.000	0,00	-	100	298.972.349	25	71.296.578	25	51.530.787	-	45.625.996	-	130.468.133	50	298.911.494	50,00%	99,98%	50,00	298.911.494	0,00%	131,84%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	48,00	140.000.000	0,00	-	12	37.596.459	3	8.000.000	3	6.700.000	3	6.350.000	3	16.546.000	12	37.596.000	100,00%	100,00%	12,00	37.596.000	25,00	26,85%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	48,00	400.000.000	0,00	-	12	102.746.600	3	21.558.578	3	21.080.787	3	15.575.996	3	44.475.933	12	102.691.294	100,00%	99,95%	12,00	102.691.294	25,00	25,67%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	48,00	200.000.000	0,00	-	12	158.629.290	3	41.738.000	3	23.750.000	3	23.700.000	3	69.436.200	12	158.624.200	100,00%	100,00%	12,00	158.624.200	25,00	79,31%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	0,00	640.000.000	0,00	-	100	807.252.800	25	25.795.777	25	120.815.665	-	243.091.630	-	416.248.668	50	805.951.740	50,00%	99,84%	50,00	805.951.740	0,00%	1186,88%

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra sd Tahun 2024(Ahkr Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran Renstra sd tahun 2024 (%)	
								I		II		III		IV									
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	20,00	320.000.000	0,00	-	5	43.440.000	1	10.846.635	2	13.945.392	1	10.009.564	1	8.462.179	5	43.263.770	100,00%	99,99%	5,00	43.263.770	25,00	13,52%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perorangan (Unit)	20,00	20.000.000	0,00	-	7	170.480.000	2	13.274.142	2	78.079.823	2	22.569.566	1	56.509.709	7	170.463.240	100,00%	99,99%	7,00	170.463.240	35,00	852,32%
Pemeliharaan/Rahabiltas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4,00	200.000.000	0,00	-	1	543.465.300	-	-	1	26.190.450	-	196.223.500	-	319.943.900	1	542.357.850	100,00%	99,80%	1,00	542.357.850	25,00	271,18%
Pemeliharaan/Rahabiltas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4,00	100.000.000	0,00	-	1	49.867.500	1	1.675.000	1	2.600.000	1	14.259.000	1	31.332.880	1	49.866.880	100,00%	100,00%	1,00	49.866.880	25,00	49,87%
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																		100,00%	99,30%				
Predikat Kinerja																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
INSPEKTORAT DAERAH																							
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			18.200.000.000				2.022.354.440		203.310.000		535.141.160		489.395.120		793.231.940		2.021.078.220		99,94%		2.021.078.220		11,10%
Penyenggaraan Pengawasan Internal	Meningkatnya Laporan Hasil Pemeriksaan (Laporan)	0,00	12.400.000.000	0,00	-	349	660.241.040	87	92.240.000	80	139.147.940	-	135.501.000	-	292.141.831	167	659.030.771	47,85%	99,82%	167,00	659.030.771	0,00%	31,35%
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	336,00	4.800.000.000	0,00	-	84	362.753.400	21	79.640.000	21	82.268.305	21	129.761.000	21	70.557.000	84	362.226.305	100,00%	99,85%	84,00	362.226.305	25,00	7,55%
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	336,00	1.600.000.000	0,00	-	84	54.914.000	21	-	21	14.816.635	21	-	21	39.996.844	84	54.813.479	100,00%	99,82%	84,00	54.813.479	25,00	3,43%
Revisi Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Kinerja (Laporan)	336,00	1.200.000.000	0,00	-	42	46.038.272	42	-	-	-	-	-	-	44.916.000	42	44.916.000	100,00%	99,73%	42,00	44.916.000	12,50	3,74%
Revisi Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Keuangan (Laporan)	336,00	1.000.000.000	0,00	-	42	95.870.000	42	12.600.000	-	39.660.000	-	5.740.000	-	37.640.000	42	95.640.000	100,00%	99,76%	42,00	95.640.000	12,50	9,56%
Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota (Laporan)	24,00	1.000.000.000	0,00	-	6	32.393.776	-	-	6	-	-	-	-	32.290.000	6	32.290.000	100,00%	99,68%	6,00	32.290.000	25,00	3,23%
Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)	4,00	1.000.000.000	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00	0,00%
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP (Dokumen)	24,00	1.800.000.000	0,00	-	6	69.271.592	-	-	-	2.403.000	3	-	3	66.741.987	6	69.144.987	100,00%	99,82%	6,00	69.144.987	25,00	3,84%
Penyenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat (Papan)	0,00	5.800.000.000	0,00	-	100	1.362.113.400	25	111.070.000	25	395.993.220	-	353.894.120	-	501.090.109	50	1.362.047.449	50,00%	100,00%	50,00	1.362.047.449	0,00%	41,95%
Penanganan Penyelesaian Keuangan Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Keuangan Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	4,00	1.000.000.000	0,00	-	4	171.450.000	1	32.070.000	1	36.770.000	1	28.340.000	1	74.260.000	4	171.440.000	100,00%	99,99%	4,00	171.440.000	100,00	17,14%
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	48,00	4.800.000.000	0,00	-	100	1.190.663.400	25	79.000.000	25	359.223.220	25	325.564.120	25	426.830.109	100	1.190.607.449	100,00%	100,00%	100,00	1.190.607.449	208,33	24,80%
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																		100,00%	99,94%				
Predikat Kinerja																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			6.800.000.000				1.280.946.536		147.527.570		303.925.000		306.347.655		522.420.870		1.280.221.055		99,94%		1.280.221.055		18,83%
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Terbentuknya kebijakan di bidang pengawasan (Dokumen)	0,00	1.600.000.000	0,00	-	2	14.230.096	-	-	-	-	-	-	-	14.172.000	-	14.172.000	0,00%	99,58%	0,00	14.172.000	0,00%	1,77%
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	4,00	800.000.000	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00	0,00%
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	4,00	800.000.000	0,00	-	1	14.230.096	-	-	-	-	1	-	-	14.172.000	1	14.172.000	100,00%	99,58%	1,00	14.172.000	25,00	1,77%

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s.d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s.d tahun 2024 (%)	
								I		II		III		IV									
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100%	14 = 6 ÷ 12	15=14/5 x100%									
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Pendampingan dan Asistensi	Meningkatnya pelayanan terhadap perangkat daerah (Persen)	0,00	5.200.000.000	0,00	-	100	1.266.716.440	25	147.527.570	25	303.925.000	-	306.347.655	-	508.248.870	50	1.266.049.095	50,00%	99,95%	50,00	1.266.049.095	0,00%	140,10%
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (Perangkat Daerah)	168,00	800.000.000	0,00	-	42	739.867.000	42	121.850.000	42	220.080.000	42	177.030.000	42	220.740.000	42	739.700.000	100,00%	99,98%	42,00	739.700.000	25,00	92,46%
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	168,00	800.000.000	0,00	-	42	41.220.000	42	-	42	-	42	-	42	41.180.000	42	41.180.000	100,00%	99,90%	42,00	41.180.000	25,00	5,15%
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	48,00	2.800.000.000	0,00	-	12	203.581.440	3	8.817.570	3	750.000	3	68.027.655	3	125.703.870	12	203.299.095	100,00%	99,86%	12,00	203.299.095	25,00	7,26%
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (Perangkat Daerah)	168,00	800.000.000	0,00	-	42	282.048.000	42	16.860.000	42	83.095.000	42	61.290.000	42	120.625.000	42	281.870.000	100,00%	99,94%	42,00	281.870.000	25,00	35,23%
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																100,00%	99,94%						
Predikat Kinerja																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
						16.982.918.664	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										100,00%	99,43%					
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						

2.2 Realisasi Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2024, Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 16.982.918.664,- untuk memenuhi kebutuhan anggaran pada 3 Program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp.13.679.617.688,- Program Penyelenggaraan Pengawasan sebesar Rp. 2.022.354.440 dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi sebesar Rp. 1.280.946.536. Sampai 31 Desember 2024, realisasi anggaran yang dicapai sebesar 16.885.737.414 atau 99,43 %.

REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT T.A. 2024

Kode Rekening	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU	REALISASI ANGGARAN	
			REALISASI BELANJA	PERSENTASE
1	2	4	5	6
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	13.679.617.688	13.584.438.099	101,49%
6.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	163.126.501	163.120.200	78,38%
6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.530.407.968	11.438.669.983	100,35%
6.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	118.819.120	118.379.600	87,86%
6.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	657.049.361	656.425.981	177,58%
6.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	103.989.589	102.979.100	99,03%
6.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	298.972.349	298.911.494	95,16%
6.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	807.252.800	805.951.741	94,15%
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2.022.354.440	2.021.078.220	96,26%
6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	660.241.040	659.030.771	79,22%
6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1.362.113.400	1.362.047.449	107,44%
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.280.946.536	1.280.221.095	84,43%
6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	14.230.096	14.172.000	7,79%
6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi	1.266.716.440	1.266.049.095	94,88%
	JUMLAH	16.982.918.664	16.885.737.414	99,43%

2.3 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah

Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu membantu Gubernur membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah .

Pada dasarnya Inspektorat merupakan Perangkat Daerah yang bertugas melaksanakan pengawasan dengan menjalankan fungsi penjaminan mutu (quality assurance) dan konsultasi (consulting), sehingga secara tugas pokok dan fungsi tidak melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat secara penuh. Adapun pelayanan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat merupakan pelayanan yang bersifat konsultatif/consulting kepada Perangkat Daerah lain.

Namun demikian, Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat terus melakukan Inovasi di bidang pengawasan dengan mengembangkan sarana pengaduan untuk masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan terutama atas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi melalui Aplikasi Whistleblowing System (WBS).

Berdasarkan RPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026, Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan Urusan Pengawasan Dalam penyusunan program dan kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2023- 2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanannya didasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut.

Selain itu, pelayanan Inspektorat berupa sarana pengaduan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan pada Tahun 2024 melalui Whistleblowing System telah menerima sejumlah 7 Pengaduan Masyarakat yang dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Jenis Pengaduan	Jumlah Pengaduan	Selesai	Proses	Keterangan
1	Pelanggaran/ Dugaan Pelanggaran Bidang Kepegawaian	1	1	0	Telah direkomendasikan ke pihak terkait (BKD) untuk pemberian sanksi disiplin
2	Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Khusus (korupsi, gratifikasi, suap, pencucian uang, dan sejenisnya)	5	5	0	3 pengaduan ditindaklanjuti oleh Bagian TLHP Inspektorat untuk penyelesaian temuan, 1 pengaduan tindaklanjutnya diserahkan ke pihak berwenang/ instansi terkait, 1 pengaduan lainnya dilimpahkan ke pihak terkait
	Pelanggaran Peraturan dan Ketentuan lain yang berlaku di	1	1	0	Diselesaikan dengan mediasi antara pelapor dengan terlapor

3	Lingkungan Pemprov Sulawesi Barat				
---	-----------------------------------	--	--	--	--

Dari tabel diatas diketahui bahwa seluruh pengaduan masyarakat yang telah disampaikan melalui saluran pengaduan WBS telah diverifikasi dan di Tindak Lanjuti seluruhnya.

2.4 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah

1. Masih adanya Aparat Sipil Negara (ASN) yang menghadapi permasalahan hukum (tindak pidana korupsi);
2. Kurangnya respon entitas (OPD) dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan;
3. Belum maksimalnya pelaksanaan MoU pengawasan penyelenggaraan pemerintahan antara APIP dan APH;
4. Belum terpenuhinya Ketersediaan Anggaran sesuai Mandatory akibat keterbatasan sumber daya finansial dalam operasionalisasi kelembagaan

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Program pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut.

Setiap kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Selanjutnya pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat beserta tujuan, sasaran dan indikatornya tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2023 – 2026 yang dijabarkan melalui target tahunan pada dokumen Renja. Inspektorat berdasarkan Rencana Strategisnya telah menetapkan Tujuan dan Sasaran yakni :

Tujuan :

1. Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur pengawas
2. Meningkatnya kapasitas pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme

Sasaran :

1. Meningkatnya Kapabilitas Fungsional Pengawas.
2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

Berikut gambaran capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat sesuai capaian Rencana Strategis yang telah ditetapkan pada tahun sebelumnya, tahun berjalan dan proyeksi capaian tahun berikut hingga akhir periode Renstra :

TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR	TARGET RENSTRA				CAPAIAN		PROYEKSI	
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Tujuan :										
1	Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur pengawas	Tenaga Fungsional Pengawas Tersertifikasi	9	7	6	8	17	9	6	8

2	Meningkatnya kapasitas pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme	Tingkat Penyelesaian kasus Pengaduan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Sasaran :										
1	Meningkatnya Kapabilitas Fungsional Pengawas	Sertifikasi Tenaga Fungsional	9	7	6	8	17	9	6	8
2	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Tingkat Penyelesaian kasus Pengaduan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase temuan BPK yang ditindaklanjuti	80%	80%	80%	80%	70%	74%	75%	78%
		Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
		Nilai Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
		Tingkat Capaian Monitoring Control Prevention (MCP) Korsupgah KPK	78	79	80	81	75	77	80	81
		Opini BPK atas penyajian laporan keuangan Pemda	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Predikat SAKIP Provinsi	B	B	B	B	B	A	A	A
		RB Provinsi	B	B	B	B	B	-	B	B
		Pelayanan Publik	HIJAU (B)	HIJAU (B)	HIJAU (B)	HIJAU (B)	KUNING	HIJAU (A)	HIJAU (A)	HIJAU (A)
		Tingkat Kepatuhan LHKPN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui adanya beberapa target target yang belum di capai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan yakni Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI yang ditargetkan mencapai 80%, akan tetapi sampai akhir periode rencana kerja hanya dapat dicapai 74%.

Begitu pula atas Target capaian Nilai *Monitoring Centre For Prevention* (MCP) KPK RI yang ditargetkan 79 Poin, tetapi pada akhir periode rencana kerja hanya dapat dicapai 77 Point.

Pada Tahun 2024, capaian target Tujuan dan Sasaran secara umum telah dicapai secara maksimal, bahkan beberapa terdapat beberapa target yang capaiannya melebihi rencana target yang telah ditetapkan yakni sertifikasi tenaga fungsional Auditor dan PPUPD, dari target 6 Orang pada akhir periode Renja 2024 realisasi capaiannya mencapai 9 Orang, target nilai SAKIB dan RB Provinsi serta SAKIP OPD juga capaiannya malampui target yang telah ditetapkan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		INSPEKTORAT DAERAH						16.907.532.001,00							18.635.957.071,00	
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						4.745.186.064,00							7.577.500.000,00	
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH						4.745.186.064,00							7.577.500.000,00	
1.	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sakip lingkup OPD	-			80 Poin	902.635.000,00						-	1.327.500.000,00	
	6.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Lingkup OPD Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD	-			25 Poin 25 Poin 25 Poin 25 Poin	46.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Inspektorat	-	46.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	14.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Inspektorat		14.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	16.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Inspektorat		16.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7 Laporan	16.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Inspektorat		16.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD	-			100 Persen 100 Persen	40.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-	-	45.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				77 Dokumen	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		35.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.1.02.0007	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD				12 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		10.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD	-			100 Persen	95.135.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-	-	150.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	65.135.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		120.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				15 Orang	30.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		30.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD	-			100 Persen	246.500.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-	-	546.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	8.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		8.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	SS-4.1. Me nguatkan Sistem Pe merintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		30.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	SS-4.1. Me nguatkan Sistem Pe merintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		6.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	SS-4.1. Me nguatkan Sistem Pe merintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		2.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		500.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	120.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Inspektorat	-	150.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				15 Unit	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Inspektorat		150.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	175.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Inspektorat	-	185.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Inspektorat		35.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	SS-4.1. Me nguatkan Sistem Pe merintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Inspektorat		100.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	SS-4.1. Me nguatkan Sistem Pe merintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Inspektorat		50.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	180.000.000,00			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	SS-4.1. Me nguatkan Sistem Pe merintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Inspektorat	-	205.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				5 Unit	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	SS-4.1. Me nguatkan Sistem Pe merintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Inspektorat		80.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	SS-4.1. Me nguatkan Sistem Pe merintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Inspektorat		30.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	SS-4.1. Me nguatkan Sistem Pe merintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Inspektorat		50.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Inspektorat		45.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
2.	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Level Kapabilitas APIP	-			3 Level	2.700.000.000,00						-	4.550.000.000,00	
	6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan	-			349 Laporan	2.100.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Inspektorat	-	3.100.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.1.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				84 Laporan	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Inspektorat		1.200.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.1.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				84 Laporan	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Inspektorat		400.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.1.01.0003	Reviu Laporan Kinerja														
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				84 Laporan	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Inspektorat		300.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.1.01.0004	Reviu Laporan Keuangan														
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				84 Laporan	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Inspektorat		250.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.1.01.0005	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota				6 Laporan	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Inspektorat		250.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.1.01.0006	Kerjasama Pengawasan Internal														
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				1 Kesepakatan	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Inspektorat		250.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.1.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP														
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				6 Dokumen	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Inspektorat		450.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase pengaduan masyarakat yang memenuhi syarat selesai ditindaklanjuti	-			13 Laporan	600.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Inspektorat	-	1.450.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.1.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah														
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				1 Laporan	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Inspektorat		250.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.1.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				12 Laporan	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Inspektorat		1.200.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
3.	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase perangkat daerah yang mendapatkan pendampingan dan asistensi	-			100 persen	1.142.551.064,00						-	1.700.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Kebijakan yang dikeluarkan	-			2 Dokumen	300.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Inspektorat	-	400.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.1.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan														
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				1 Rekomendasi	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Inspektorat		200.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.1.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan														
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun				1 Rekomendasi	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Inspektorat		200.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Kebijakan yang dikeluarkan	-			2 Dokumen	300.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Inspektorat	-	400.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.1.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan														
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				1 Rekomendasi	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Inspektorat		200.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.1.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan														
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun				1 Rekomendasi	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Inspektorat		200.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Kebijakan yang dikeluarkan	-			2 Dokumen	842.551.064,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Inspektorat	-	1.300.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.1.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				42 Perangkat Daerah	192.551.064,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Inspektorat		200.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.1.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				42 Perangkat Daerah	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Inspektorat		200.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.1.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi</i>				12 Kegiatan	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Inspektorat		700.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.1.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas														
			<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas</i>				42 Perangkat Daerah	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Inspektorat		200.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	X	NON URUSAN						12.162.345.937,00							11.058.457.071,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						12.162.345.937,00							11.058.457.071,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Nilai Sakip lingkup OPD</i>	-			80 Poin	12.162.345.937,00						-	11.058.457.071,00	
	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Lingkup OPD Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD</i>	-			25 Poin 25 Poin 25 Poin	143.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-	-	68.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	X.XX.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	14.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		14.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD	-			100 Persen 100 Persen	11.869.345.937,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Inspektorat	-	10.560.457.071,00	INSPEKTORAT DAERAH
	X.XX.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				77 Orang/ Bulan	11.869.345.937,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Inspektorat		10.560.457.071,00	INSPEKTORAT DAERAH
	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD	-			100 Persen	80.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Inspektorat	-	350.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 Orang	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Inspektorat		350.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD	-			100 Persen	70.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Inspektorat	-	80.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	X.XX.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Inspektorat		80.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
		J U M L A H						16.907.532.001,00							18.635.957.071,00	

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 masih dimungkinkan mengalami perubahan dikarenakan masih akan melalui proses desk Rencana Kerja dan evaluasi Gubernur yang merupakan bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.

Kegiatan, Indikator, target kinerja dan pagu anggaran yang disusun masih bersifat indikatif selain merupakan jabaran dari Renstra Perangkat Daerah juga mengacu pada RKPD sebagai jabaran RPJMD, disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 - 2026.

Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025, yang akan memuat indikator maupun penjabaran pagu anggaran yang lebih rinci.

Demikian Rencana Kerja Tahun 2024 ini disusun agar bermanfaat bagi pihak-pihak terkait.

Mamuju, Juli 2024

Kepala Inspektorat Daerah



Drs. H.M. Natsir MM

NIP: 19661231 198603 1 116

Pangkat: Pembina Utama Madya